

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Cetakan Kedua (Revisi), UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2000.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- B.N. Marbun, *DRR-RI; Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Eep Faifulloh Fatah dalam *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 terjadi pelbagai kerusuhan?*, Laboratorium Fisip UI bekerjasama dengan Mizan, Jakarta-Bandung, 1997.
- Friedrich Naumann Stiftung Randall dan Svasand. *Strategi Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Herbert Feith, dalam kata pengantarnya untuk buku *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.
- I.Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- IDEA, *Penilaian demoratisasi di Indonesia*, International IDEA, Stocholm, Swedia, 2000.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Kansil C. S. T., *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Lance Castles *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Hsitoris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.I, 2004.

- Lili Romli. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah; Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, Februari 2012.
- M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua (Revisi), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Martin H. Hutabarat, Zairin Harahap, Dahlan Thaib (penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Penegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Yayasan Prapantja, Jakarta, Cetakan Pertama, 1959.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Mei 2005.
- Ni'matul Huda, *Kompleksitas Persoalan Kebijakan Desentralisasi dan Hambatan Investasi Daerah*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, November 2009.
- Nukthoh Arfawe Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum; Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Oktober 2005.
- Nurhasan: *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standart Internasional*, diterbitkan oleh PIRAC dan The asia Foundation, Jakarta, 1999.

S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1991.

Sirajuddin, *Hubungan Pusat-Daerah; konsepsi, Problematika dan alternatif solusi*, terdapat dalam, Nuruddin Hady, Lutfhi J Kurniawan, Zulkarnain dan Sirajuddin (penyunting), *Konstitusionalisme Demokrasi; Sebuah Diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi sebagai Kado untuk "Sang Penggembala" Prof. A. Mukthie Fadjar, SH., MS.*, In-TRANS Publishing, Malang, Januari 2010.

Sigit Pamungkas, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Sri Hastuti Puspitasari , “ Pemilu dan Demokrasi: Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”, *Jurnal Hukum*, No 25 Vol 11-2004.

Sujamto. *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Sutan Sjahrir, *Pikiran dan Perjuangan*, Penerbit Jendela, Yogyakarta, Juli 2001.

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, Cet. Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta 2005.

### **Peraturan PerUndang-Undangan dan Wawancara, Media Online**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jakarta, 2005.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah perubahan dari UU No. 32 Tahun 2004.

UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap UU No. 32/2004 terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

Pasal 37 ayat (2), UU No. 32/2004.

Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004.

Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009.

Wawancara langsung dengan ketua DPC PDI P BANTUL, di kantor DPC, Bantul,  
Rabu 07 Mei 2014.

Wawancara tahap berikutnya, ketua DPC PDIP BANTUL, di kantor DPC, Bantul,  
Jum'at 30 Mei 2014.

Wawancara Penulis di kantor DPC PDIP Bantul, pada tanggal 13 Juni 2014.

[www.hukumonline.com/pilkada.Bantul/2010](http://www.hukumonline.com/pilkada.Bantul/2010). terakhir di akses, 22 Maret 2014.